



# WALIKOTA BINJAI

**PERATURAN WALIKOTA BINJAI  
NOMOR 45 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI  
PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN  
KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BINJAI,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Provinsi Sumatera Utara untuk Tahun Anggaran 2014, telah ditetapkan Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2014;
- b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 28 Tahun 2014 tentang Perubahan Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian Provinsi Sumatera Utara Nomor 521.4/205.11/PLA.S/XI/2014 tentang Realokasi Kedua Kebutuhan Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Antar Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014, maka Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2014 perlu dilakukan perubahan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2014;

Mengingat .....

Mengingat

1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254) ;

12. Peraturan .....



12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/PERMENTAN/SR.140/6/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 122/Permentan/SR.130/11/2013 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2014;
18. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 30 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2012 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 31 TAHUN 2013 TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BINJAI TAHUN ANGGARAN 2014.**

**Pasal I**

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Walikota Binjai Nomor 31 Tahun 2013 tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kota Binjai Tahun Anggaran 2014 ( Berita Daerah Kota Binjai Tahun 2013 Nomor 31), diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal II .....

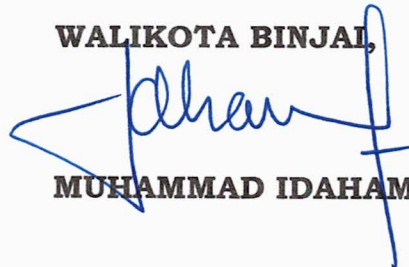
## Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak Nopember 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

**Ditetapkan di Binjai**  
**pada tanggal 15-11-2014**

**WALIKOTA BINJAI,**



**MUHAMMAD IDAHAM**

**Diundangkan di Binjai**  
**pada tanggal 15-11-2014**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,**



**ELYUZAR SIREGAR**

**BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2014 NOMOR 45**

**LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BINJAI**

**NOMOR** : 45 Tahun 2014

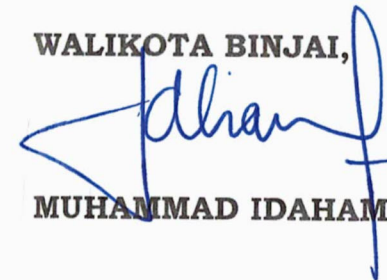
**TANGGAL** : 15-11-2014

**TENTANG** : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 31 TAHUN 2013  
TENTANG ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK  
BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KOTA BINJAI TAHUN 2014

**KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2014  
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN KECAMATAN**

No.	KECAMATAN	SEMULA (TON)					MENJADI (TON)				
		Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK	Urea	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	BINJAI UTARA	270	100	125	285	70	270	100	100	167	70
2	BINJAI TIMUR	155	60	95	200	50	155	60	45	100	50
3	BINJAI SELATAN	272	156	180	500	70	272	156	93	221	70
4	BINJAI BARAT	15	10	11	10	20	15	10	6	7	20
5	BINJAI KOTA	3	2	5	2	9	3	2	2	2	9
	<b>Jumlah</b>	<b>715</b>	<b>328</b>	<b>416</b>	<b>997</b>	<b>219</b>	<b>715</b>	<b>328</b>	<b>246</b>	<b>497</b>	<b>219</b>

WALIKOTA BINJAI,



MUHAMMAD IDAHAM